



Keputusan Wali Kota
No. 000.7.2 / 273 / 2026

Lampiran XV

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027



DINAS LINGKUNGAN HIDUP



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2 / 273 / 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, dengan sistematika terdiri atas:

a. Bab I : Pendahuluan;

b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

a. Bab III : Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan; dan

b. Bab IV : Penutup.



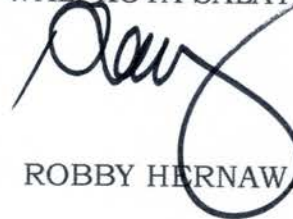
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:
- a. Lampiran I : Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Lampiran II : Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
 - c. Lampiran III : Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Lampiran IV : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - e. Lampiran V : Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Lampiran VI : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Lampiran VII : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Lampiran VIII : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Lampiran IX : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Lampiran X : Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
 - k. Lampiran XI : Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - l. Lampiran XII : Rencana Kerja Dinas Sosial;
 - m. Lampiran XIII : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - n. Lampiran XIV : Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - o. Lampiran XV : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - p. Lampiran XVI : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Lampiran XVII : Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. Lampiran XVIII : Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Lampiran XIX : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - t. Lampiran XX : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Lampiran XXI : Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - v. Lampiran XXII : Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
 - w. Lampiran XXIII : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - x. Lampiran XXIV : Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - y. Lampiran XXV : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - z. Lampiran XXVI : Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 - aa. Lampiran XXVII : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - bb. Lampiran XXVIII : Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
 - cc. Lampiran XXIX : Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
 - dd. Lampiran XXX : Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
 - ee. Lampiran XXXI : Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.



- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 Agustus 2026

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.



PEMERINTAH KOTA SALATIGA



RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SALATIGA TAHUN 2027

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SALATIGA**



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Hasanudin Nomor 110 Salatiga Kode Pos 50722 Telp. (0298) 326826

Faks. (0298) 326826 Situs <https://dlh.salatiga.go.id>

Surat elektronik dlh@salatiga.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SALATIGA
NOMOR 900.1.1.2/2311/2025**

**TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2027**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SALATIGA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas penyusunan Rencana Kerja (RENJA), perlu dibentuk tim penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2027;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2027, dengan data sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
- a. melakukan pengumpulan data pendukung penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga;
 - b. melakukan pembahasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga;
 - c. melakukan pengumpulan data dan pembahasan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga; dan

- e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga.

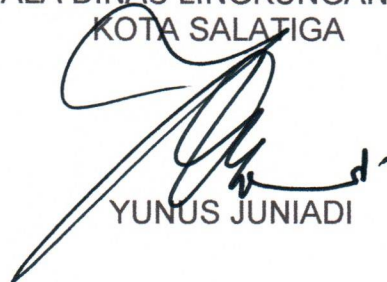
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPPA SKPD Lingkungan hidup.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal : 5 Desember 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SALATIGA



YUNUS JUNIADI

Tembusan :

1. Wali Kota Salatiga (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga; dan
5. Segenap Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SALATIGA
NOMOR : 900.1.1.2/2311/2025
TANGGAL : 5 Desember 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2027

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Penasehat
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan Dan Penaatan Lingkungan Hidup	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemeliharaan Dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SALATIGA,



YUNUS JUNIADI

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SALATIGA
TAHUN 2027

Pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam, telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Dinas Lingkungan Hidup, dengan hasil sebagai berikut :

- Kesatu : sistematika penulisan Renja berpedoman dengan ketentuan pada pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri No 14 Tahun 2026, paling sedikit memuat 6 (enam) bab yaitu:
1. Pendahuluan;
 2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 5. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 6. Penutup.
- Kedua : melakukan penyempurnaan rancangan Renja Tahun 2027 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan akhir Renja sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen Renja Tahun 2027 kepada Kepala BAPPEDA Kota Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Perkada RKPD di tetapkan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Salatiga



YUNUS JUNIADI, ST., MM., MT
NIP. 19780602 200312 1 005

Koordinator Tim Verifikasi Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
Kabid Perenc. Ekbang BAPPEDA
Kota Salatiga


JOKO PRASETYO, ST., MT
NIP. 19761023 200502 1 007

Lampiran I:
Berita Acara Hasil Verifikasi Renja
PD Tahun 2027

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
Kebijakan Renja
Dinas Lingkungan Hidup
Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	V			Agar dapat Dilengkapi dengan SK Tim (Sudah Terlampir SK)
2.	Pengolahan data dan informasi.	V			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
6.	Penelaahan RKPD kabupaten/kota.	V			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	V			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	V			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	V			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	V			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			

Formulir Verifikasi Sistematika RENJA 2027
Dinas Lingkungan Hidup
Kota Salatiga

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/ Keterangan
			Ada	Tidak	
BAB I PENDAHULUAN					
I.1	Latar belakang	Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja PD Tahun 2027 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD	V		Dicek kembali, penulisan latar belakang <i>double</i> judul. Latar belakang berisi gambaran kondisi yang mendasari penyusunan Renja 2027, bukan membahas Renja Perubahan 2025 <i>(Sudah di TL/Diperbaiki hal 1-2)</i>
I.2	Dasar hukum penyusunan	Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2027, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.	V		Tambahkan Perwali Nomor 12 Tahun 2026 tentang RKPD Tahun 2027. Perda Jateng 6/2024 bukan RPJPD Salatiga. Permendagri 12/2024,Perwali 36/2024, Perwali 16/2025 dihapus. Landasan Hukum sesuaikan peraturan terkait terbaru, bukan landasan hukum RKPD 2025. <i>(Sudah di TL/Diperbaiki hal 2-3)</i>
I.3	Maksud dan tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renja PD	V		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/ Keterangan
			Ada	Tidak	
I.4	Sistematika penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renja PD	V		Sistematikan disesuaikan menjadi 6 bab, sesuai SE Sekda <i>(Sudah di TL/Diperbaiki hal.5)</i>
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU					
II.1	Evaluasi Capaian Kinerja	Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)	V		Capaian kinerja IKU dan IKK belum ada, mohon ditambahkan evaluasi capaian IKU dan IKK pada sub bab Evaluasi capaian kinerja <i>(Sudah di TL /Diperbaiki hal.6-15)</i>
II.2	Evaluasi Capaian SPM	Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait)	V		Evaluasi capaian SPM DLH belum ada, mohon ditambahkan <i>(Sudah di TL /Diperbaiki hal.16-17)</i>
II.3	Permasalahan dan Isu Strategis	Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis	V		Di naskah renja agar judul disesuaikan dengan judul ini “Permasalahan dan Isu Strategis”. Dan isu dari sub bab ini adalah Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 <i>(Sudah di TL /Diperbaiki hal.18-20)</i>
II.4	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD	V		Belum ada, untuk ditambahkan telaah pokok-pokok pikiran DPRD beserta daftar usulannya <i>(Sudah</i>

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/ Keterangan
			Ada	Tidak	
					<i>di TL /Diperbaiki hal.20-21)</i>
II.5	Usulan Masyarakat	Telaah Usulan Masyarakat	V		Belum ada, untuk ditambahkan telaah usulan masyarakat beserta daftar usulan masyarakat yang ada di DLH <i>(Sudah di TL /Diperbaiki hal.21)</i>
II.6	Inovasi	Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat	V		Belum ada, mohon ditambahkan inovasi pada DLH <i>(Sudah di TL /Diperbaiki hal.21-23)</i>
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH					
III.1	Tujuan dan Sasaran Renja PD	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)	V		Cek kembali tujuan dan sasaran Renja DLH <i>(Sudah di TL /Diperbaiki hal.24-27)</i>
III.2	Arah Kebijakan	Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya	V		Arah kebijakan belum ada, agar dituangkan dalam sub bab tersendiri, sistematika agar menyesuaikan dengan isi BA ini <i>(Sudah di TL /Diperbaiki hal.28-31)</i>

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/ Keterangan
			Ada	Tidak	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
IV.1	Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan	V		Uraian program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2027 di Bab IV (sesuai format sistematika) disertai usulan pendanaan <i>(Sudah di TL /Diperbaiki hal.32-45)</i>
IV.2	Tematik	Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), Program Strategis Nasional (ProSN), tematik lainnya sesuai bidang urusan dan hal-hal lainnya (direktif pemerintah)	V		Dukungan program dan kegiatan terhadap kebijakan tematik dituangkan dalam Bab IV. Sistematika agar menyesuaikan dengan isi BA ini <i>(Sudah di TL /Diperbaiki hal.45-46)</i>
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN					
V.1	Indikator Kinerja Utama PD	Target keberhasilan pencapaian yang didasarkan pada tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	V		Bab V target keberhasilan pencapaian (IKU) belum ada. Mohon dilengkapi. Sesuaikan dengan format sistematika 6 Bab <i>(Sudah di TL /Diperbaiki hal.47-49)</i>
V.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	V		Bab V target kinerja penyelenggaraan urusan (IKK) belum ada. Mohon dilengkapi. Sesuaikan dengan format sistematika 6 Bab <i>(Sudah di TL /Diperbaiki hal.49-50)</i>

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/ Keterangan
			Ada	Tidak	
BAB VI PENUTUP					
V	Penutup	Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evalusi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah	V		Penutup berisi kesimpulan, kaidah pelaksanaan, dan Pelaksanaan pengendalian evaluasi. Penutup Renja 2027 bukan Perubahan 2025. <i>(Sudah di TL /Diperbaiki hal.51-52)</i>

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 3

 1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU 6

 2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan tahun 2025 6

 2.2 Evaluasi Capaian SPM tahun 2023-2025..... 16

 2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027 18

 2.4 Telaah Pokok Pikiran DPRD 20

 2.5 Usulan Masyarakat..... 21

 2.6 Inovasi bidang urusan 21

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 24

 3.1 Tujuan dan Sasaran DLH Kota Salatiga Tahun 2027..... 24

 3.2 Arah Kebijakan DLH Kota Salatiga Tahun 2027..... 28

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 32

 4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 32

 4.2 Rencana Kerja untuk Pencapaian program Prioritas Daerah,
 Kontribusi Terhadap Pencapaian Target Nasional dan Program
 Strategis Nasional..... 45

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 47

BAB VI PENUTUP 51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja). Renja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan penjabaran operasional tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027.

Arah kebijakan pembangunan Kota Salatiga pada tahun 2027 difokuskan pada tema: "Pengembangan SDM yang Sehat dan Cerdas dan Perekonomian Daerah yang Unggul, Didukung Pelayanan Publik Bermutu dan Infrastruktur Wilayah yang Sesuai Daya Dukung Lingkungan Hidup". Tema prioritas ini secara eksplisit menempatkan urusan lingkungan hidup bukan sekadar sebagai sektor pendukung, melainkan sebagai prasyarat dasar (fondasi) dari setiap pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi kota.

Sebagai kota yang terus mengalami pertumbuhan aktivitas ekonomi, jasa, dan pendidikan, Kota Salatiga dihadapkan pada dinamika dan tekanan ekologis yang membutuhkan intervensi strategis. Beberapa isu strategis dan permasalahan lingkungan hidup yang menjadi fokus penanganan DLH Kota Salatiga pada tahun 2027 meliputi:

1. Pengelolaan Persampahan Terpadu: Peningkatan volume timbulan sampah harian akibat aktivitas rumah tangga dan komersial yang berimbas pada kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ngronggo. Oleh karena itu, diperlukan akselerasi pengurangan sampah dari sumbernya, optimalisasi TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce*, *Reuse*, *Recycle*), serta penguatan peran Bank Sampah untuk mendukung ekonomi sirkular.
2. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): Perlunya upaya berkesinambungan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas air permukaan (khususnya sungai dan sumber air di wilayah



Salatiga), pengendalian pencemaran udara akibat peningkatan emisi transportasi dan kegiatan usaha, serta penjagaan indeks kualitas lahan.

3. Penyediaan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH): Pemenuhan proporsi RTH publik sangat penting untuk fungsi hidrologis kota (resapan air) dan estetika, sekaligus memberikan ruang interaksi sosial bagi masyarakat yang sejalan dengan peningkatan kualitas SDM.
4. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim: Peningkatan ketahanan kota terhadap dampak perubahan iklim global melalui Program Kampung Iklim (ProKlim), konservasi sumber daya air, serta pengendalian kerusakan lingkungan di kawasan rawan bencana hidrometeorologi.

Berdasarkan kondisi tersebut, Renja DLH Kota Salatiga Tahun 2027 disusun sebagai instrumen manajerial yang memuat rumusan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, lengkap dengan indikator kinerja (keluaran dan hasil) serta pagu indikatif pendanaan. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan kota dan daya dukung lingkungan, guna mewujudkan Kota Salatiga yang berkelanjutan dan nyaman dihuni (*livable city*).

2.1 LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2027 ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025–2029;
12. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027

3.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2027 mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk mempertajam arah kebijakan yang koordinatif, sinergi, dan transparansi guna mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan bidang Lingkungan Hidup. Maksud dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2027 adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2027, mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

2.1.1 Maksud

Maksud Penyusunan RENJA Tahun 2027 Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga adalah terciptanya Pembangunan berkelanjutan di Kota Salatiga yang asri, lestari dan berwawasan lingkungan dan untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Salatiga dan mengoptimalkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang salah satunya melakukan pelayanan prima kepada masyarakat serta melaksanakan program pembangunan lingkungan hidup.

2.1.2 Tujuan

1. Tersusunnya pedoman untuk meningkatkan kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga di bidang pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan bidang pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup Kota Salatiga.
4. Tersusunnya rencana tindak yang merupakan penjabaran dari rencana strategis bidang-bidang kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga dalam melaksanakan otonomi daerah.
5. Tersusunnya program pembangunan Kota Salatiga di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Tersusunnya kegiatan dalam kurun waktu satu tahun di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup

2.2 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Tahun 2025
- 2.2 Evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2023-2025
- 2.3 Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027
- 2.4 Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD
- 2.5 Telaah Usulan Masyarakat
- 2.6 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran DLH Kota Salatiga 2027
- 3.2 Arah kebijakan DLH Kota Salatiga 2027

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Uraian Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2. Tematik

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027
- 5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

BAB VI PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Tahun 2025

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2025 adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis dari DLH. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ini menyajikan dasar Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga selama tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026.

Jumlah anggaran pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga adalah sebesar Rp. 34.049.631.268,00 dengan 8 program dan 15 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp. 31.504.232.688,00. Dengan capaian realisasi hingga akhir tahun anggaran 92,52%.

Hasil evaluasi program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada table 2.1 sebagai berikut:



Table 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kode					Urusan /Urusan Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target program , kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7 / 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10 / 4)* 100
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HDUP									
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	85,00	81,09	84,00	83,41	99%	84,50	249	293%
						Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00					100,00	100	100%
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75,40					75,30	75,3	100%
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,00	10,00	10,00	6,00	60%	10,00	26	260%
2	11	01	2.01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10,00	10,00	10,00	6,00	60%	10,00	26	260%
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00	12,00	12,00	9,00	75%	12,00	33	275%



2	11	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	119,00	121,00	136,00	116,00	85%	119,00	356	299%
2	11	01	2.02	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1,00	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	2	200%
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,00	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	2	200%
2	11	01	2.03	00 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	1,00	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	2	200%
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1,00	0,00	1,00	0,00	0%	0,00	0	0%
2	11	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1,00	0,00	1,00	0,00	0%	0,00	0	0%
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, laporan fasilitas kunjungan tamu, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1,00	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	2	200%
2	11	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	2	200%
2	11	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	2	200%
2	11	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3	300%
2	11	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	2	200%
2	11	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	2	200%
2	11	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1,00	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	2	200%
2	11	01	2.06	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1,00	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	2	200%
2	11	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1,00	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	3	300%
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,00	0,00	1,00	0,00	0%	2,00	2	67%
2	11	01	2.07	00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	1,00	1,00	0,00	0%	0,00	1	
2	11	01	2.07	00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1,00					1,00	1	100%
2	11	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12,00					10,00	10	83%



2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,00	4,00	4,00	0,00	0%	4,00	8	200%
2	11	01	2.08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	2	200%
2	11	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,00	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	2	200%
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,00	4,00	4,00	3,00	75%	5,00	12	300%
2	11	01	2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5,00	5,00	5,00	6,00	120%	5,00	16	320%
2	11	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65,00	62,00	63,00	62,00	98%	64,00	188	289%
2	11	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6,00							0%
2	11	01	2.09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3,00		3,00	3,00	100%	3,00	6	200%
2	11	01	2.09	00 01 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63,00	3,00	3,00	0,00	0%	62,00	65	103%
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	IKPLHD		1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3	
						KLHS		2,00	1,00	1,00	0%	0,00	3	
						Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan LH (%)	60,00					30,00	30	50%
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/ Kota				1,00		1,00	2	
2	11	02	2.01	03	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun							0	



2	11	02	2.01	03	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1,00		1,00	0,00	0%	1,00	1	100%
2	11	02	2.01		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota								
2	11	02	2.01	00 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten / Kota yang Disusun (Dokumen)	0,00							
2	11	02	2.01	00 05	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten / Kota yang Disusun (Dokumen)	0,00							
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemantauan status mutu air (%)	100,00	100,00	100,00	75,00	75%	100,00	275	275%
						Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium (%)	100,00	100,00	100,00	0,00	0%	100,00	200	200%
						Presentase Konservasi Lahan	20,00	5,00	15,00	10,00	67%	15,00	30	150%
						Persentase Konservasi Sumber Mata Air	30,00	10,00	30,00	15,00	50%	30,00	55	183%
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Terlaksananya pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	3,00	3,00	3,00	0,00	0%	3,00	6	200%
2	11	03	2.01	00 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2,00	1,00	1,00	0,00	0%	2,00	3	150%
2	11	03	2.01	00 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1,00	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	2	200%
2	11	03	2.01	00 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	1,00		1,00	0,00	0%	1,00	1	100%
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau Tingkat Kota (%)	18,50	17,00	17,40	17,40	100%	18,00	52,4	283%
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	321,05	321,00	321,01	321,00	100%	321,03	963,03	300%
2	11	04	2.01	00 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	321,05	321,00	321,01	321,00	100%	321,03	963,03	300%



2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN(LIMBAH B3)	Persentase penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan		20,00	30,00	0,00	0%		20	
						Persentase kelompok masyarakat yang memahami rencana aksi pengurangan dan penghapusan peralatan bermerkuri (%)	20,00					10,00	10	50%
						Persentase sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya beracun (limbah B3) yang terkumpul (%)	40,00					30,00	30	75%
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1,00	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	2	200%
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1,00	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	2	200%
2	11	06	2.01		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IJIN LINGKUNGAN DAN IJIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan (%)	38,93	42,85	100,00	25,00	25%	39,23	107,08	275%
						Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan danPUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Drah Kab/Kota		56,31	32,00	49,85	156%		106,16	
						Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		100,00	100,00	100,00	100%		200	



						Persentase tersusunnya dokumen IGRK		100,00	100,00	15,00	15%		115	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	32,00	12,00	28,00	25,00	89%	46,00	83	259%
2	11	06	2.01	05	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	56,00		53,00	60,00	113%	46,00	106	189%
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan tingkat kabupaten/kota		100,00	100,00	0,00	0%		100	
						Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi		100,00	100,00	56,00	56%		156	
						Peningkatan Kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup		20,00	40,00	20,00	50%		40	
						Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh penyuluhan, kampanye dan pelatihan lingkungan hidup (%)	63,00					60,00		0%
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3	300%
2	11	08	2.01	00 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	3	300%
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang terfasilitasi (%)	100,00							0%
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20,00							0%
2	11	08	2.01	00 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai	20,00							0%



					Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)								
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100,00							0%
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		5,00							0%
2	11	10	2.01	00 09	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten / Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	5,00							0%
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah (%)	73,00	77,54	70,00	75,63	108%	74,00	227,17	311%
						Persentase pengurangan sampah perkotaan (%)	26,00	19,70	30,00	22,81	76%	25,00	67,51	260%
						Persentase pengangkutan sampah	0,00	77,54	70,00	75,63	108%		153,17	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah		3,00	3,00	2,00	67%	4,00	9	
2	11	11	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	13,00	7,00	12,00	8,00	67%	12,00	27	208%
2	11	11	2.01	03	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	34.097,62	31.727,84	31.727,84	13720,12	43%	33.429,04	0	0%
2	11	11	2.01		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	30.241,39	32.952,57	32.952,57	0,00	0%	30.858,56	63.811,13	211%



2	11	11	2.01	02 0	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	5,00	1,00	1,00	2,00	200%	4,00	7,00	140%
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terlaksananya penilaian kinerja unit/usaha/swasta/ kelompok masyarakat/ lembaga dalam pengelolaan sampah	13,00	7,00	11,00	12,00	109%	12,00	31	238%
2	11	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah unit/usaha/swasta/ kelompok masyarakat/ lembaga dalam pengelolaan sampah melaksanakan penilaian kinerja	13,00	7,00	11,00	12,00	109%	12,00	31	238%



Realisasi capaian kinerja Bidang Urusan DLH Kota Salatiga Tahun 2025 yang diukur melalui IKU dan IKK disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Realisasi IKU DLH Kota Salatiga Tahun 2025

No	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	69,93	68,70	98,24	IKU Renstra 2023-2026
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	41,60	73,76	177,31	IKU RENSTRA 2023-2026
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	80,20	75,97	94,73	IKU RENSTRA 2023-2026
4	Indeks Kualitas lahan (IKL)	47,00	46,55	99,04	IKU RENSTRA 2023-2026

Sumber : olah data 2026

Tabel 2.3
Realisasi IKK DLH Kota Salatiga tahun 2025

No	IKK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota	69,93	68,70	NA
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kota	98,22	45,50	NA
3	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan	9,9	3,33	NA

2.2 Evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2023-2025

Dalam kerangka regulasi dan perencanaan daerah, perlu dilakukan sedikit penyesuaian terminologi terkait evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Urusan Lingkungan Hidup dikategorikan sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Oleh karena itu, capaian kinerja DLH tidak dievaluasi menggunakan kerangka Standar Pelayanan Minimal (SPM), melainkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Untuk DLH Kota Salatiga, evaluasi capaian kinerja pada periode 2023–2025 difokuskan pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), pengelolaan persampahan, dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Berikut adalah ringkasan evaluasi capaian kinerja strategis DLH Kota Salatiga yang dijabarkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kota Salatiga

NO	Indikator	SPM/ Standarisasi	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kualitas Air		IKU	71,03	71,13	71,23	71,33			71,13	71,33	
2	Indeks Kualitas Udara		IKU	84,76	84,77	84,78	84,79			84,78	84,79	
3	Indeks Kualitas Lahan		IKU	40,63	40,65	84,78	40,69			84,78	40,69	
4	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah		IKU	15	25	84,78	35			84,78	35	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		IKK	69,93	69,98	70,03	70,07			70,03	70,07	
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota		IKK	9,9	9,62	8,41	8,26			8,41	8,26	
7	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kab/Kota		IKK	98,22	98,25	98,35	98,4			98,35	98,4	

2.3 Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

1. Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD

Beberapa isu strategis yang diangkat dalam Renstra DLH sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian serta rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan yang dibuat oleh pelaku usaha (SPPL, UKL-UPL, AMDAL)
2. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian serta rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap masyarakat terkait dengan pengelolaan limbah
3. Masih rendahnya prosentase luas RTH Publik, karena perencanaan taman dalam masterplan belum sepenuhnya terealisasi
4. Masih rendahnya kualitas tutupan lahan dengan Indeks Kualitas Lahan masih masuk kategori “kurang baik”

Dari isu strategis tersebut telah ditangani secara bertahap dan optimal sehingga target yang diharapkan dapat terealisasi dengan baik

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup diantaranya adalah:

- a. Keterbatasan penyediaan sarana dan prasana persampahan menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penanganan sampah termasuk penerapan Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Bertambahnya jumlah kendaraan bermesin , dan sumber pencemar emisi lainnya.
- c. Tingginya alih fungsi lahan menyebabkan turunnya indeks kualitas lahan.
- d. Masih rendahnya koordinasi lintas OPD dalam penanganan limbah Domestik



- e. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pengangkut Sampah.
 - f. Kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan limbah
 - g. Peningkatan luasan RTH tidak berbanding lurus dengan penyerapan beban pencemar udara (Diperlukan tegakan/ vegetasi penyerap emisi karbon)
 - h. Kurangnya jumlah SDM dan kompetensi pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
 - i. Kurang optimalnya penyuluhan tentang pengelolaan sampah dari sumbernya.
 - j. Kurang optimalnya penegakan hukum lingkungan.
3. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi perlu dimaksimalkan terutama untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri atas indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang terdiri dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan.

Berikut adalah capaian IKU tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Target	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Kualitas Air	41,60	177,31
2.	Indeks Kualitas Udara	80,20	94,73
3.	Indeks Kualitas Lahan	47,00	99,04
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,93	98,24

4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan

Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dan pengurangan sampah rumah tangga serta upaya meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap pengendalian pencemaran merupakan tantangan yang harus



dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai indeks kualitas lingkungan hidup yang optimal. Dalam hal ini DLH terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan terutama terhadap pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup juga terus berupaya untuk meningkatkan sosialisasi kepada warga masyarakat maupun pelaku usaha dan stake holder terkait dalam menerapkan Perda Nomor 1 tahun 2024.

2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok Pikiran DPRD merupakan saran dan pendapat DPRD yang dihimpun berdasarkan hasil reses maupun aspirasi masyarakat sebagai salah satu bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan hasil telaah terhadap Pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga yang menjadi bahan penyusunan RKPD Tahun 2027, terdapat usulan yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga. Usulan-usulan tersebut secara umum meliputi peningkatan pelayanan persampahan, pengadaan sarana dan prasarana kebersihan, serta pengelolaan ruang terbuka hijau. Pokok Pikiran DPRD tersebut selanjutnya telah diselaraskan dan ditindaklanjuti ke dalam rumusan program dan kegiatan pada penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2027. Berikut tabel rincian usulan Pokir dan kegiatan oleh Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027.

Table 2.4
Usulan Progam dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2027

No.	Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Pengusul	Anggaran	Catatan
1.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Salatiga		Rp.215,000,000,00	Pokir
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup				



	Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				
2.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Salatiga		Rp.300.000.000,00	Pokir
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
3	Program Pengelolaan Persampahan	Salatiga		Rp.70.000.000,00	Pokir
	Pengelolaan Sampah				
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				

2.5 Telaah Usulan Masyarakat

DLH Kota Salatiga tidak mendapat usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2027 dari para Pemangku Kepentingan, baik usulan bersumber dari DPRD, kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun dari pihak yang berkaitan dengan DLH Kota Salatiga.

2.6 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada urusan Lingkungan Hidup, DLH Kota Salatiga berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai inovasi pelayanan yang berorientasi pada peningkatan efektivitas, efisiensi, kemudahan akses, transparansi, dan akuntabilitas. Pengembangan inovasi akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi informasi, serta dinamika penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara.

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, DLH Kota Salatiga telah mengembangkan dan mengimplementasikan beberapa inovasi pelayanan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya. Keberadaan inovasi tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas pelayanan



kepada ASN maupun masyarakat yang memperoleh layanan di bidang kepegawaian. Adapun inovasi yang telah dikembangkan dan diimplementasikan oleh DLH Kota Salatiga antara lain sebagai berikut:

1. MATAMSA (Pemanfaatan Taman Salatiga)

Inovasi ini menggeser paradigma taman kota dari sekadar Ruang Terbuka Hijau (RTH) pasif menjadi ruang publik yang aktif, interaktif, dan multifungsi bagi warga Salatiga. Optimalisasi aset ruang publik untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental masyarakat, serta pelestarian ekologi perkotaan. Taman difungsikan sebagai laboratorium alam terbuka. Masyarakat, terutama pelajar, dapat belajar langsung mengenai keanekaragaman hayati, resapan air, dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan. Menyediakan fasilitas publik yang aman dan ramah bagi semua kalangan (termasuk lansia dan difabel) untuk berinteraksi sosial, berolahraga, dan berekreasi, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan indeks kebahagiaan warga. Mendukung ekosistem *smart city* dengan menyediakan fasilitas informasi digital terkait flora/fauna taman, pemantauan kualitas udara secara *real-time*, atau penyediaan zona Wi-Fi untuk mendukung aktivitas kreatif warga di ruang terbuka.

2. KANDA LAMPAH (Kantor Sadar Mengelola Sampah)

Inovasi ini menempatkan instansi pemerintah sebagai *role model* (teladan) dalam pengelolaan sampah yang sistematis dan bertanggung jawab, sebelum direplikasi secara luas ke tengah masyarakat. Penerapan sistem pemilahan, pengurangan, dan pemanfaatan kembali sampah (3R) yang ketat di lingkungan perkantoran. Masyarakat mendapatkan pelayanan berupa contoh nyata (bukan sekadar teori atau imbauan) tentang bagaimana tata kelola sampah yang benar diimplementasikan. Perkantoran yang bersih dan terkelola sampahnya akan meningkatkan kenyamanan masyarakat yang datang untuk mengurus pelayanan administratif. Inovasi ini dapat diintegrasikan dengan sistem digitalisasi bank sampah. Sampah terpilah dari kantor disalurkan ke bank sampah induk atau sektor informal, yang secara langsung menghidupkan sirkular ekonomi dan memberdayakan masyarakat sekitar.



Penurunan volume sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) secara signifikan. Ini merupakan bentuk pelayanan jangka panjang berupa jaminan lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan terhindar dari krisis penumpukan sampah.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran DLH Kota Salatiga 2027

Tujuan dan sasaran Renja DLH Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan turunan dari Renstra DLH Tahun 2025-2029. Berdasarkan dokumen Renstra, tujuan Renja DLH Kota Salatiga adalah **“Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan”** dengan indikator capaian kinerja meliputi: Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara ; Indeks Kualitas Lahan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga adalah **“Meningkatnya pengelolaan sampah perkotaan”**. Untuk mengukur pencapaian sasaran maka ditetapkan indikator sasaran Renstra DLH Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah. Indikator Kinerja Utama urusan lingkungan hidup terlihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:



TABEL 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja IKU

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Rumus	Satuan	Target 2027	Target 2030
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan		Indeks Kualitas Air	$IP_j = \sqrt{\frac{(Ci/Lij)^2_M + (Ci/Lij)^2_R}{2}}$	Nilai	71,13	71,53
			Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1)\right)$	Nilai	84,78	84,81
			Indeks Kualitas Lahan	$IKL = 100 - \left[\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK\right) \times 100\right) \times \frac{50}{54,3}\right]$	Nilai	40,67	40,73
2		Meningkatnya pengolahan sampah perkotaan	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Jumlah sampah yang diolah di fasilitas pengolahan sampah / Jumlah sampah yang masuk di fasilitas pengolahan sampah X 100	%	30	45



DLH Kota Salatiga juga menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara urusan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator Kinerja Kunci urusan lingkungan hidup terlihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

TABEL 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja IKK

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Capaian 2025	Target 2027	Target 2030
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	$IKLH=(0,376 \times IKA)+(0,405 \times IKU)+(0,219 \times IKL)$	Nilai	68,7	70,03	70,16
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota / Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan X 100	%	NA	8,41	6,19
3	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah total volume sampah yang dapat ditangani / Jumlah seluruh total volume timbunan sampah tahun berjalan Kabupaten/Kota X 100	%	NA	98,35	98,5

DLH Kota Salatiga juga menetapkan program dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Kota, dengan rincian tabel 3.3 sebagai berikut:



TABLE 3.3
Dukungan Progam dan Kegiatan Daerah Terhadap Prioritas Kota

No	Prioritas Kota	Progam	Aktivitas
1	PROGRAM SARI (Salatiga lestari):	Program Pengelolaan Persampahan	Membangun sistem pengelolaan sampah terpadu ditingkat kelurahan / kecamatan.
2		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Mendorong terciptanya kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
4		Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
5		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Revitalisasi Taman Kota dan Ekowisata yang mengedepankan keunggulan kompetitif tiap wilayah (kelurahan / kecamatan).

Sumber : RPJMD Kota salatiga 2025-2029

3.2. Arah Kebijakan DLH Kota Salatiga Tahun 2027

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2027 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada urusan lingkungan hidup. Perumusan arah kebijakan mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2025–2029, diselaraskan dengan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027, serta memperhatikan kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup, dan tata kelola persampahan.

Penyusunan arah kebijakan juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, perkembangan kondisi lingkungan strategis, serta berbagai tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, arah kebijakan yang ditetapkan diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis sekaligus menjaga kesinambungan pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan sampah di hulu secara tuntas melalui Bank Sampah, TPS3R dan lembaga pengelola sampah kawasan dan penataan TPA.
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan, peningkatan ketaatan pelaku usaha dan peningkatan keterlibatan masyarakat.
3. Optimalisasi program kegiatan pengelolaan Limbah B3 serta penyediaan fasilitas sarana prasarana pengelolaan limbah B3 rumah tangga.
4. Peningkatan pengelolaan limbah B3 melalui peningkatan pembinaan, pengawasan dan penertiban peredaran alkes dan produk bermerkuri serta optimalisasi penegakan hukum lingkungan terkait pengelolaan limbah B3 pada pelaku usaha.
5. Menambah tutupan vegetasi dalam rangka meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH).



6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha serta mendorong percepatan pemenuhan perizinan bidang lingkungan.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, berbagai kebijakan dirancang untuk mewujudkan Indonesia Emas, salah satunya adalah perwujudan **Ketahanan Ekologi** (Lingkungan Hidup yang Berkualitas). Ketahanan ekologi diperlukan dalam rangka memastikan daya dukung lingkungan yang memadai untuk menopang kehidupan dan pembangunan berkelanjutan di daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat, meminimalkan dampak krisis iklim, serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan sirkular. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa isu strategis dalam upaya ketahanan ekologi, antara lain: peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencakup kualitas air, udara, dan tutupan lahan, pengelolaan persampahan terpadu berbasis ekonomi sirkular, pemulihan lahan kritis, serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*.

Sejalan dengan RPJPN Tahun 2025–2045, di dalam rancangan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 terdapat 8 Asta Cita yang dijadikan 8 Prioritas Nasional. Prioritas Nasional yang menjadi fokus utama dan didukung langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga adalah **Prioritas Nasional (Asta Cita) ke-8**, yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, DLH juga turut mendukung **Asta Cita ke-2** khususnya pada aspek mendorong kemandirian bangsa melalui penciptaan *ekonomi hijau*. Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Nasional digambarkan pada tabel 3.4 sebagai berikut:

TABLE 3.4
Dukungan Progam dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Progam	Aktivitas
1	Mendorong kemandirian bangsa melalui	Program Pengelolaan Persampahan	Membangun sistem pengelolaan sampah



2	penciptaan <i>ekonomi hijau</i> .		terpadu ditingkat kelurahan / kecamatan.	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Revitalisasi Taman Kota dan Ekowisata yang mengedepankan keunggulan kompetitif tiap wilayah (kelurahan / kecamatan).	
3		Mendorong terciptanya kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.		
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			

Sumber : RPJN Tahun 2025-2045

Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 menetapkan 11 (sebelas) program prioritas Provinsi Jawa Tengah. Salah satu program prioritas yang dapat didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga adalah Prioritas yang keenam, yaitu **Penanggulangan Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan**, yang dalam pelaksanaannya di tingkat kota difokuskan pada perlindungan kualitas lingkungan hidup, optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta akselerasi penuntasan dan pengelolaan



sampah secara terpadu. Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Provinsi digambarkan pada tabel 3.5 berikut ini:

Table 3.5
Dukungan Progam dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Provinsi

No	Prioritas Provinsi	Progam	Aktivitas
1.	Penanggulangan Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan , yang dalam pelaksanaannya di tingkat kota difokuskan pada perlindungan kualitas lingkungan hidup, optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta akselerasi penuntasan dan pengelolaan sampah secara terpadu.	Program Pengelolaan Persampahan	Membangun sistem pengelolaan sampah terpadu ditingkat kelurahan / kecamatan.
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Revitalisasi Taman Kota dan Ekowisata yang mengedepankan keunggulan kompetitif tiap wilayah (kelurahan / kecamatan).
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Mendorong terciptanya kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

Sumber : RPJMD Provinsi Tahun 2025-2045



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan DLH Kota Salatiga Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) DLH Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Penyusunannya mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2027, serta memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja, pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DLH secara efektif, efisien, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Perumusan program dan kegiatan renja mengacu pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 yakni dengan mempertimbangkan Pencapaian visi dan misi kepala daerah serta tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah: “Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga berkaitan langsung dengan misi ke-4 (empat) yaitu “Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pemanfaatan tata ruang yang inklusif dan berkualitas melalui Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2027 peningkatan kesadaran Masyarakat, pemanfaatan teknologi dan penegakan hukum”.

Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Program, Kegiatan, Subkegiatan selama kurun waktu tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Pengamanan barang milik daerah SKPD
- d. Administrasi Pegawai Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 3) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - 4) Penyediaan bahan logistik kantor
 - 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 7) Fasilitas kunjungan kerja
 - 8) Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 2) Pengadaan mebel
 - 3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - 4) Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - 5) Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya



2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

- 1) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut
- 2) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- 3) Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ Kota

3. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota

- 1) Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IJIN LINGKUNGAN DAN IJIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Kota

- 1) Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

5. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota

- 1) Pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota

6. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota

- 1) Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota

b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota

- 1) Pembuatan pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD
- 2) Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang



7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup

8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

9. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

a. Pengelolaan Persampahan

- 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
- 2) Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
- 3) Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota atau TPA/ TPST regional.
- 4) Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah

b. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah

10. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

a. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Berikut rincian rumusan tersebut pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan tahun 2027 pada tabel 4.1 sebagai berikut.



Tabel 4.1
Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
serta Pendanaan tahun 2027

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup			33.098.401.899
A.1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,00 100 75,4	21.969.459.399
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	10	6.752.355
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	6.752.355
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	100	18.049.117.994
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119	11.104.736.080
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	6.944.381.914
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana	100	50.100.000
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	50.100.000



NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	0
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100	540.000.000
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	11.227.000
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	20.991.000
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	11.227.000
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	95.543.600
5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	36.150.000
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	0
5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	8.900.000
5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	86.705.000



NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	65.455.000
6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	65.455.000
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	0
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	879.890.000
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5.000.000
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	730.890.000
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	144.000.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100	2.647.400.450
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	109.957.000
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65	2.239.803.450
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	18.320.000
8.4	Pemeliharaan/	Jumlah Gedung Kantor	1	200.000.000



NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
	Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		
8.5	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		79.320.000
B	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan LH	1	58.672.000
9	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan		58.672.000
9.1	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan		58.672.000
10	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Kab/Kota yang disusun		0
10.1	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun		0
C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemantauan status mutu air	100	990.000.000
		Persentase pemeliharaan sarana prasarana laboratorium	100	
11	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Terlaksananya pengujian yang	2	990.000.000



NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
		dilaksanaka		
11.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	765.000.000
11.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	120.000.000
11.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	105.000.000
D.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau Tingkat Kota	18,5	700.000.000
12	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	321,05	700.000.000
12.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	321,05	700.000.000
E.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kelompok masyarakat yang memahami rencana aksi pengurangan dan penghapusan peralatan bermerkuri (%) Persentase sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya beracun (limbah B3) yang terkumpul (%)	20 40	33.000.00 33.000.00
13	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan	1	33.000.00



NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
		Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		
13.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1	33.000.00
F.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH	Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan (%)	38,93	29.850.000
14	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	47	29.850.000
14.1	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	47	29.850.000



NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
	terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
G.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh penyuluhan, kampanye dan pelatihan lingkungan hidup (%)	63	56.280.000
15	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	56.280.000
15.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	56.280.000
H.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang terfasilitasi (%)	100	47.863.000
16	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	20	47.863.000
16.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	20	47.863.000



NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
I.	ROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	35.000.000
17	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten /Kota	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	35.000.000
17.1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ dikelola (Pengaduan)	5	35.000.000
J.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah (%) Persentase pengurangan sampah perkotaan (%)	73 26	9.138.277.500
18	Pengelolaan Sampah	Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota, Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para	4	9.138.277.500



NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
		Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah		
18.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	13	116.000.000
18.2	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	34097,62	1.782.277.500
18.3	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/k ot a atau TPA/TPST Regional (Ton)	30241,3	7.200.000.000
18.4	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	5	40.000.000
19	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Usaha/Swasta/ Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah	13	40.000.000
19.1	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/ Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja (Unit)	13	40.000.000



Sumber : DLH Kota Salatiga 2026

Berdasarkan tabel tersebut, pelaksanaan urusan penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pada Tahun 2027 didukung oleh 10 program, 19 kegiatan, dan 39 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp33.098.401.899. Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DLH Kota Salatiga sebagaimana ditetapkan dalam Renstra DLH Kota Salatiga Tahun 2025-2029 serta mendukung prioritas pembangunan daerah Tahun 2027.

4.2. Rencana Kerja untuk Pencapaian program Prioritas Daerah, Kontribusi Terhadap Pencapaian Target Nasional dan Program Strategis Nasional

DLH Kota Salatiga memiliki program yang secara khusus ditetapkan sebagai Program Prioritas Daerah, Program Strategis Nasional (ProSN), maupun program yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah. Prioritas Daerah (Kota Salatiga): Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), optimalisasi pelayanan tata kelola persampahan terintegrasi (termasuk efisiensi pemetaan rute angkutan dan digitalisasi), serta perwujudan Salatiga sebagai *Smart City* yang berwawasan lingkungan. Target Nasional (RPJMN & Jakstranas): Pencapaian target pengurangan sampah dan penanganan sampah, penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ERK), dan peningkatan kualitas air, udara, serta tutupan lahan. Program Strategis Nasional (PSN) & Global (SDGs): Mendukung SDGs Tujuan 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan), Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), serta Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan transisi menuju ekonomi hijau (*Green Economy*)

Meskipun demikian, program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga dirancang secara selaras guna mendukung Rencana Kerja untuk Pencapaian Program Prioritas Daerah melalui penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui optimalisasi pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran, penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), serta inovasi pelayanan lingkungan. Langkah-langkah strategis ini sekaligus menjadi bentuk nyata Kontribusi Terhadap



Pencapaian Target Nasional dan selaras dengan pelaksanaan Program Strategis Nasional di sektor lingkungan, guna mewujudkan pembangunan daerah yang bersih, sehat, dan berwawasan ekologis



BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan target kinerja Bidang Urusan DLH Kota Salatiga Tahun 2027 sebagai tolok ukur pencapaian kinerja perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. Penetapan target kinerja mengacu pada Renstra DLH Kota Salatiga Tahun 2025–2029, dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLH Tahun 2025 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2027.

Target kinerja yang disajikan meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027. Penetapan target tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga konsistensi pencapaian sasaran strategis perangkat daerah secara bertahap sesuai tahapan Renstra DLH Kota Salatiga Tahun 2025-2029, sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja DLH Kota Salatiga pada Tahun 2027. Berikut rinciannya :

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi atau instansi. IKU digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu entitas telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. IKU merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi.

Adapun target Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2025–2029 dan hasil evaluasi Renja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Target IKU DLH Kota Salatiga tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET 2027
1	2	3	4	5
1	Indeks Kualitas Air	Nilai	73,76	71,23
2	Indeks Kualitas Udara	Nilai	75,97	84,78
3	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	46,55	40,67
4	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	NA	30

Sumber : Renstra DLH 2025-2029

Berdasarkan Tabel 5.1, target IKU DLH Kota Salatiga Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Renstra DLH Kota Salatiga Tahun 2025-2029



serta mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025. Penetapan target tersebut dilakukan sebagai tahapan pencapaian sasaran

1. Indeks Kualitas Air

Indikator ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar yang mendukung pelayanan masyarakat. Berdasarkan data yang tersedia, nilai indikator mengalami penurunan dari 73,7 menjadi 71,23. Penurunan tersebut dikarenakan adanya perubahan perhitungan pada indikator Infrastruktur.

2. Indeks Kualitas Udara

Indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan pengelolaan kualitas udara terhadap target baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) meningkat dari 75,97 menjadi 84,78, yang menunjukkan semakin baiknya pengendalian emisi dan penjagaan kualitas udara ambien. Capaian tersebut juga mencerminkan peningkatan konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan agar tetap selaras dengan upaya pelestarian fungsi pelestarian udara.

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup, khususnya dalam pengendalian pencemaran udara, menunjukkan perkembangan positif. Peningkatan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) menjadi indikator bahwa pelaksanaan urusan bidang Lingkungan Hidup telah memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan tingkat emisi gas buang, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, serta terwujudnya lingkungan udara yang lebih bersih, sehat, dan sesuai dengan standar baku mutu udara ambien.

3. Indeks Kualitas Lahan

Indikator ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas tutupan lahan yang mendukung daya dukung serta kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan data yang tersedia, nilai indikator mengalami penurunan dari 46,5 menjadi 40,67. Penurunan tersebut dikarenakan adanya Penghijauan yang ada di turus jalan banyak yang berkurang (pemotongan) karena faktor usia maupun investasi.



4. Persentase timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Salatiga, bahwa melalui urusan bidang Dinas Lingkungan Hidup, dalam menangani permasalahan lingkungan dengan meningkatkan kapasitas dan efektivitas operasional fasilitas pengolahan sampah. Berdasarkan dokumen perencanaan, target untuk indikator Persentase timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah pada tahun 2027 ditetapkan sebesar 30%. Penetapan target ini menjadi acuan strategis yang baru untuk mengukur efektivitas tata kelola persampahan di daerah, mengingat pada tahun 2025 indikator spesifik ini belum memiliki data realisasi (NA). Karena sampah dari sumber masih belum terpilah, anggaran operasional terbatas, masyarakat belum sepenuhnya memperoleh edukasi.

5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. IKK membantu mengukur pencapaian target, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan menjadi acuan dalam menyusun rencana pembangunan daerah, serta mengevaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Target IKK DLH Kota Salatiga tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET 2027
1	2	3	4	5
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) Kota	Nilai	68,7	70,03
2	Terlaksananya pengelolaan sampah regional/terpadu di wilayah kota	%	98,16	98,35
3	Ketaatan penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	9,23	8,41

Sumber : olah data 2026



Berdasarkan Tabel 5.2, target IKK DLH Kota Salatiga Tahun 2027 disusun mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Renstra DLH Kota Salatiga Tahun 2025–2029 dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025. IKK berfungsi sebagai indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam rangka mendukung sasaran pembangunan daerah.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) Kota

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) Kota Salatiga sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tahun 2025 telah mencapai kategori Baik dengan nilai 68,7. Kinerja ini ditargetkan tetap stabil dan dipertahankan sebesar 70,03 pada tahun 2027. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Salatiga telah mencapai kondisi yang optimal. Ke depan, fokus diarahkan pada pemeliharaan serta peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar kualitas pelestarian lingkungan tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

2. Terlaksananya pengelolaan sampah regional/terpadu di wilayah kota

Persentase penanganan sampah melalui sistem pengelolaan sampah regional/terpadu di wilayah Kota Salatiga pada tahun 2025 mencapai 98,16%. Pada tahun 2027 ditargetkan meningkat menjadi 98,35 %. Dengan demikian, masih diperlukan peningkatan cakupan pelayanan sebesar poin persentase untuk mencapai target pengelolaan sampah secara menyeluruh di wilayah kota.

3. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah



BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup menjadi sangat penting artinya dalam mengatasi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan lingkungan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang berpihak pada masyarakat. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Output Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga adalah Program Tahunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2027, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DLH. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

A. Catatan Penting

Renstra Kota Salatiga DLH dan RPJMD Kota Salatiga menjadi pedoman dalam penyusunan Renja, tetapi ada tahap dimana Perangkat Daerah harus melakukan analisis kebutuhan untuk tahun 2027 yang akan disesuaikan dalam penentuan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2027.

B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan Renja DLH Kota Salatiga tahun 2027, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh staf DLH Kota Salatiga secara individu dan organisasi mempunyai tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan dan mensukseskan Renja Tahun 2027 sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaannya;



3. Dalam pelaksanaan pada tahun 2027 dimungkinkan terjadi perubahan, baik dari evaluasi yang dilakukan DLH sendiri ataupun dari pihak yang berkaitan seperti Bappeda, BPKPD dan Inspektorat. Perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam penyusunan Perubahan Renja DLH 2027.

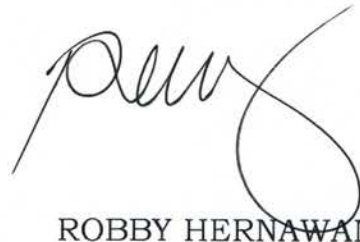
C. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, DLH Kota Salatiga menentukan beberapa rencana tindak lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan harus berpedoman dengan aturan-aturan yang ada;
2. Peningkatan lingkungan DLH Kota Salatiga sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing;
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2027. Agar dapat menjadi pedoman perencanaan bidang Lingkungan Hidup di Kota Salatiga.

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

LAMPIRAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SALATIGA
TAHUN 2027

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SALATIGA
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Lingkungan Hidup						33.098.401.899,00							34.718.881.293,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						33.098.401.899,00							34.718.881.293,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						33.098.401.899,00							34.718.881.293,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						21.958.232.399,00							23.024.343.558,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-		-	85 Nilai	21.958.232.399,00						-	23.024.343.558,00	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		-	75,4 Nilai	21.958.232.399,00						-	23.024.343.558,00	
			Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-		-	100 %	21.958.232.399,00						-	23.024.343.558,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.752.355,00					-		7.089.972,00	
		-						6.752.355,00					-		7.089.972,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	6.752.355,00						-	7.089.972,00	
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6.752.355,00							7.089.972,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	10 Laporan	6.752.355,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	7.089.972,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.049.117.994,00					-		18.951.573.884,00	
		-						18.049.117.994,00					-		18.951.573.884,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	6.944.381.914,00						-	7.291.601.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	11.104.736.080,00						-	11.659.972.884,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.104.736.080,00							11.659.972.884,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	119 Orang/bulan	11.104.736.080,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	11.659.972.884,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						6.944.381.914,00							7.291.601.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	6.944.381.914,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	7.291.601.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						50.100.000,00					-		52.605.000,00	
		-						50.100.000,00					-		52.605.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	50.100.000,00						-	52.605.000,00	
	2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						50.100.000,00							52.605.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	50.100.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	52.605.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						270.743.600,00					-		285.330.330,00	
		-						270.743.600,00					-		285.330.330,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	8.900.000,00						-	9.345.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	86.705.000,00						-	91.040.250,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	95.543.600,00						-	100.320.780,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	36.150.000,00						-	37.957.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	11.227.000,00						-	11.788.350,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	20.991.000,00						-	23.090.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	11.227.000,00						-	11.788.350,00	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						11.227.000,00							11.788.350,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	11.227.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	11.788.350,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.991.000,00							23.090.100,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	20.991.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	23.090.100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						11.227.000,00							11.788.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	11.227.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	11.788.350,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						95.543.600,00							100.320.780,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	95.543.600,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	100.320.780,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						36.150.000,00							37.957.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	36.150.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	37.957.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						8.900.000,00							9.345.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	8.900.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	9.345.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						86.705.000,00							91.040.250,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	86.705.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	91.040.250,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						65.455.000,00					-		68.727.750,00	
		-						65.455.000,00					-		68.727.750,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	65.455.000,00						-	68.727.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						65.455.000,00							68.727.750,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Unit	65.455.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	68.727.750,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	12 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						879.890.000,00					-		891.034.500,00	
		-						879.890.000,00					-		891.034.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	730.890.000,00						-	734.584.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	144.000.000,00						-	151.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.000.000,00						-	5.250.000,00	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							5.250.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	5.250.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						730.890.000,00							734.584.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	730.890.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	734.584.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						144.000.000,00							151.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	144.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	151.200.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.647.400.450,00					-		2.779.770.472,00	
		-						2.647.400.450,00					-		2.779.770.472,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	200.000.000,00						-	210.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.239.803.450,00						-	2.351.793.622,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	109.957.000,00						-	115.454.850,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	18.320.000,00						-	19.236.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	79.320.000,00						-	83.286.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						109.957.000,00							115.454.850,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	5 Unit	109.957.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	115.454.850,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.239.803.450,00							2.351.793.622,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	65 Unit	2.239.803.450,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	2.351.793.622,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18.320.000,00							19.236.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	18.320.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	19.236.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	200.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	210.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						79.320.000,00							83.286.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	63 Unit	79.320.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	83.286.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						58.672.000,00							58.965.360,00	
			Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan LH	-		-	60 %	58.672.000,00						-	58.965.360,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						58.672.000,00					-		58.965.360,00	
		-						58.672.000,00					-		58.965.360,00	
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	-		-	-	58.672.000,00						-	58.965.360,00	
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota						58.672.000,00							58.965.360,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	-		-	1 Dokumen	58.672.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	58.965.360,00	Dinas Lingkungan Hidup
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						990.000.000,00							1.039.500.000,00	
			Persentase pemantauan status mutu air	-		-	100 %	990.000.000,00						-	1.039.500.000,00	
			Persentase pemeliharaan sarana prasarana laboratorium	-		-	100 Percent	990.000.000,00						-	1.039.500.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						990.000.000,00					-		1.039.500.000,00	
		-						990.000.000,00					-		1.039.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-		-	-	120.000.000,00						-	126.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-		-	-	765.000.000,00						-	803.250.000,00	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-		-	-	105.000.000,00						-	110.250.000,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						765.000.000,00							803.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-		-	2 Dokumen	765.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	803.250.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						120.000.000,00							126.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	120.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	126.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						105.000.000,00							110.250.000,00	
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-		-	1 Dokumen	105.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	110.250.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						700.000.000,00							735.000.000,00	
			Persentase Ruang Terbuka Hijau Tingkat Kota	-		-	18,5 %	700.000.000,00						-	735.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						700.000.000,00					-		735.000.000,00	
		-						700.000.000,00					-		735.000.000,00	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	700.000.000,00						-	735.000.000,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						700.000.000,00							735.000.000,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	321,05 Ha	700.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	735.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						33.000.000,00							34.650.000,00	
			Persentase kelompok masyarakat yang memahami rencana aksi pengurangan dan penghapusan peralatan bermerkuri	-		-	20 %	33.000.000,00						-	34.650.000,00	
			Persentase sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya beracun (limbah B3) yang terkumpul	-		-	40 %	33.000.000,00						-	34.650.000,00	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						33.000.000,00					-		34.650.000,00	
		-						33.000.000,00					-		34.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	-		-	-	33.000.000,00						-	34.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan						33.000.000,00							34.650.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	-		-	1 Dokumen	33.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	34.650.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						29.850.000,00							31.342.500,00	
			Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan	-		-	38,93 %	29.850.000,00						-	31.342.500,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						29.850.000,00					-		31.342.500,00	
		-						29.850.000,00					-		31.342.500,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	-	29.850.000,00						-	31.342.500,00	
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						29.850.000,00							31.342.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-	-		47 Badan Usaha	29.850.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	31.342.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						56.280.000,00							59.094.000,00	
			Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh penyuluhan, kampanye dan pelatihan lingkungan hidup	-	-		63 %	56.280.000,00						-	59.094.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						56.280.000,00					-		59.094.000,00	
		-						56.280.000,00					-		59.094.000,00	
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	-		-	56.280.000,00						-	59.094.000,00	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						56.280.000,00							59.094.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	-		1 Dokumen	56.280.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	59.094.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						47.863.000,00							50.256.150,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase penghargaan lingkungan hidup yang terfasilitasi	-		-	100 %	47.863.000,00						-	50.256.150,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						47.863.000,00					-		50.256.150,00	
		-						47.863.000,00					-		50.256.150,00	
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	-		-	-	47.863.000,00						-	50.256.150,00	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						47.863.000,00							50.256.150,00	
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	-		-	20 Entitas	47.863.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	50.256.150,00	Dinas Lingkungan Hidup
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						35.000.000,00							36.750.000,00	
			Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	-		-	100 %	35.000.000,00						-	36.750.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						35.000.000,00					-		36.750.000,00	
		-						35.000.000,00					-		36.750.000,00	
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	-		-	-	35.000.000,00						-	36.750.000,00	
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						35.000.000,00							36.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	-		-	5 Pengaduan	35.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	36.750.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						9.138.277.500,00							9.595.191.375,00	
			Persentase penanganan sampah	-		-	73 %	9.138.277.500,00						-	9.595.191.375,00	
			Persentase pengurangan sampah perkotaan	-		-	26 %	9.138.277.500,00						-	9.595.191.375,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						9.138.277.500,00					-		9.595.191.375,00	
		-						9.138.277.500,00					-		9.595.191.375,00	
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	-		-	-	116.000.000,00						-	121.800.000,00	
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	-		-	-	40.000.000,00						-	42.000.000,00	
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	-		-	-	7.200.000.000,00						-	7.560.000.000,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	-		-	-	1.782.277.500,00						-	1.871.391.375,00	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						116.000.000,00							121.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	-		-	13 Kelompok	116.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	121.800.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan						1.782.277.500,00							1.871.391.375,00	
		Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	-		-	34097,62 Ton	1.782.277.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	1.871.391.375,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						7.200.000.000,00							7.560.000.000,00	
		Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	-		-	30241,39 Ton	7.200.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	7.560.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.11.2.01.0024	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah						40.000.000,00							42.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	-		-	5 Ton	40.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	42.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta						40.000.000,00					-		42.000.000,00	
		-						40.000.000,00					-		42.000.000,00	
			Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	-		-	-	40.000.000,00						-	42.000.000,00	
	2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah						40.000.000,00							42.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	-		-	13 Unit	40.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	42.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	J U M L A H							33.098.401.899,00							34.718.881.293,00	